

TESIS

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING* PADA PEMERINTAH KABUPATEN PULAU
TALIABU**

***THE EFFECT OF INTERNAL AUDIT AND HUMAN RESOURCE
COMPETENCE ON QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL
STATEMENTS WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS AN
INTERVENING VARIABLE IN TALIABU ISLAND DISTRICT GOVERNMENT***

disusun dan diajukan oleh:

**WA ODE HELDA
A042221014**



KEPADA

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU**

Disusun dan diajukan oleh

**WA ODE HELDA
A042221014**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si
NIP. 197106192000031001



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si
NIP. 197701192009012008

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wa Ode Helda**

NIM : **A042221014**

Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Pengaruh Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Januari 2024

yang menyatakan,



Wa Ode Helda

PRAKATA



Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji peneliti panjatkan kepada maha suci Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang berlimpah sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manuasia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.”**

Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. serta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah menjadi panutan suri tauladan bagi seluruh umat muslim.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, ada beberapa hambatan dan cobaan yang harus dilalui oleh peneliti, peneliti yakin segala hambatan dan cobaan yang dilalui akan membentuk karakter yang jauh lebih baik bagi peneliti. Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa mendapat dukungan dari orang-orang di sekeliling peneliti dan pihak-pihak yang turut membantu. Peneliti telah banyak mendapat dukungan baik itu material dan moril oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua peneliti, Bapak La Ode Rigi (Alm) dan Ibu Sarsfathy MarthamutuTewer, terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Serta saudara-saudari peneliti La Ode Farudin, La Ode Idrus Dan Wa Ode Herida
2. Bapak Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus S.T, Terimakasih Telah Memberikan Dukungan Dalam Perkuliahan Ini
3. Bapak Sekda Kabupaten Pulau Taliabu Dr. Salim Ganiru , Terimakasih atas Dukungannya

4. Bapak Haruna, S.Pd Selaku Kabag Umum Sekretiat Daerah Kab. Pulau Taliabu, (2021- 2022) Bapak Abdul Jalil, SE Selaku kabag Umum Kab. Pulau Taliabu Terima Kasih atas Dukungannya
5. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Dr.Mursalim Nohong, SE., M.Si., CRA., CRP., CWM selaku Wakil Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi.
8. Bapak Prof.Dr.. Arifuddin , SE., Ak., M.Si., CA, Selaku Wakil Dekan II, Bidang Keuangan Dan Anggaran Fajkultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
9. Ibu Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si selaku ketua Prodi Manajemen Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
10. Bapak Dr.Mursalim Nohong,SE.,M.Si.,CRA.,CRP.,CWM selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. .Nur Dwiana Sari Saudii, S.E., M.Si selaku pembimbing 2, terima kasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan kepada peneliti.
11. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si Selaku Dosen Penguji Ibu Dr, Andi Kusumawati, SE.,Ak., M.Si.,CA dan Ibu Dr. Anas Iswanto Anwari, S.E., MA. selaku dosen penguji, terima kasih atas masukan dan nasehat yang telah diberikan untuk penyusunan penelitian ini.
12. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan didikannya.
13. Bapak dan Ibu Pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Pak Haris dan pegawai lainnya yang tidak peneliti sebutkan.
14. Suamiku Tercinta Hasnul S.Pd, Anakku Fadhillah Az- Zahra, Nargis Hakimah yang sangat Mendukung penulis dalam Masa Perkuliahan serta penyusunan penelitian ini.

15. Teman-teman seperjuangan MKD 2022 " Nunung , Mar, Sano, Dahlan, Sandra, Suci , Alfat, Helda Nelvia, Ali Hamid, Fadil, Risal, Oktavianus dan teman-teman lain yang tidak sempat peneliti sebutkan namanya.
16. Sahabat-Sahabat Peneliti Hartina, Yuni, Nining, Vian Neni sejak SMA Dan SMP
17. Sahabat peneliti Nasrul, Ona , Serly, Elsa, Rani , Nisa, Mey, Yuna, Uli, Nurli, Kifli, Trisno, Kahar, Dion . Trimakasih Telah Memberikan Dukungan Dan Doa Serta Teman Teman Dan Sahabat Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Namanya Peneliti Mengucapkan Banyak Terimakasih
18. Pihak-pihak yang membantu peneliti selama proses penelitian yang tidak sempat disebutkan namanya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian ini.

Makassar, Januari 2024

Wa Ode Helda

ABSTRAK

WA ODE HELDA. *Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu* (dibimbing oleh Mursalim Nohong dan Nur Dwiana Sari Saudi).

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang pengaruh audit internal, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pulau Taliabu dengan populasi penelitian adalah auditor internal pemerintah daerah. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, 22 kuesioner yang kembali dan siap diolah dengan tingkat pengembalian 100%. Model penelitian diuji secara empiris menggunakan model persamaan struktural (SEM) dengan SmartPLS sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan audit internal, kompetensi SDM, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, kompetensi organisasi terbukti secara empiris menjadi mediator antara hubungan audit internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Teori *stewardship* dan *goal setting* mempunyai peran penting dalam mendasari praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Implikasi penelitian ini dapat membantu auditor internal pemerintah daerah di Kabupaten Pulau Taliabu dalam menjalankan fungsi kontrol internal terhadap pengelolaan sumber daya publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperbaiki reputasi serta kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan daerah, audit internal, kompetensi SDM, komitmen organisasi



ABSTRACT

WA ODE HELDA. *The Effect of Internal Audit and Human Resource Competency on Quality of Regional Government Financial Statements with Organizational Commitment as an Intervening Variable in Taliabu Island Regency Government* (supervised by Mursalim Nohong and Nur Dwiana Sari Saudi)

The research aims to present the empirical evidence regarding the impact of the internal audit, human resource competency, and organizational commitment on the quality of financial statements produced by regional governments. The internal auditors of the regional government were selected to be the research populations. The research was carried out in the Taliabu Island Regency. The purposive sampling technique was used in the sample selection process, and a questionnaire was used to gather data. A total of 22 questionnaires (100%) had been returned and were prepared for processing. Utilizing the structural equation modelling (SEM) and SmartPLS as the analysis tool, and the research model was empirically tested. The research result indicates that the internal audit, organizational commitment and HR competency have the positive and significant effect on the quality of financial statements. The principles of the goal-setting and stewardship play the significant part in supporting the public resource management practices of the accountability and transparency. The findings of this study have the implications for the regional government internal auditors in Taliabu Island Regency who oversee the administration of the public resources and can assist them in performing the internal control responsibilities to enhance the quality of the financial statements and build the public trust.

Key words: quality of regional financial statement, internal audit, HR competency, organizational commitment



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. <i>Stewardship Theory</i>	15
2.2. Teori Kelembagaan (<i>Institutional Theory</i>).....	17
2.3. Audit Internal.....	18
2.1.1. Pengertian Audit Internal	18
2.1.2. Fungsi Audit Internal.....	20
2.1.3. Ruang Lingkup Audit Internal.....	22
2.1.4. Tujuan Audit Internal	24
2.1.5. Tanggung Jawab Auditor Internal	26
2.1.6. Audit Internal Pemerintah	27
2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia	28
2.5. Komitmen Organisasi.....	32
2.6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.6.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34
2.6.2. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	35
2.6.3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36
2.6.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40

2.6.5. Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan.....	42
2.7. Tinjauan Empiris	45
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	49
3.1. Kerangka Konseptual.....	49
3.2. Hipotesis.....	50
3.2.1. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	50
3.2.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	51
3.2.3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53
3.2.4. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komitmen Organisasi	54
3.2.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komitmen Organisasi	55
BAB IV METODE PENELITIAN	57
4.1 Rancangan Penelitian.....	57
4.2 Situs dan Waktu Penelitian	57
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	58
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	58
4.5 Metode Pengumpulan Data	59
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	60
4.6.1. Variabel Penelitian	60
4.6.2. Definisi Operasional	60
4.7 Instrumen Penelitian	63
4.8 Teknik Analisis Data.....	64
4.8.1. Analisis deskriptif.....	64
4.8.2. Analisis Structural Equation Model (SEM)	65
4.8.3. Analisis Persamaan SEM dengan Partial Least Square (PLS)	65
4.8.4.1. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)..	66
4.8.4.2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)..	66
4.8.4.3. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)..	66
4.8.4.4. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)..	66

4.8.4. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	66
4.8.5. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	69
4.8.6. Uji Hipotesis	71
4.8.7. Analisis SEM dengan Efek Mediasi	71
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	73
5.1. Analisis Statistik Deskriptif	73
5.1.1. Statistik Deskriptif Variabel	74
5.1.2. Statistik Deskriptif Variabel Eksogen	75
5.1.3. Statistik Deskriptif Variabel Mediasi.....	77
5.1.4. Statistik Deskriptif Variabel Endogen.....	77
5.2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	78
5.2.1. <i>Convergent Validity</i>	79
5.2.2. <i>Discriminant Validity</i>	81
5.2.3. <i>Composite Reliability</i>	82
5.3. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	82
5.4. Uji Hipotesis.....	84
5.4.1. Uji Efek Mediasi.....	86
5.4.2. <i>Specific Indirect Effect</i>	90
5.5. Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan	91
5.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	94
5.7. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan	98
5.8. Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Komitmen Organisasi	101
5.9. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Komitmen Organisasi	103
BAB VI PENUTUP	105
6.1. Kesimpulan	105
6.2. Keterbatasan Penelitian	108
6.3. Saran dan Rekomendasi.....	1110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Hasil Audit BPK untuk Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu 2018-2022.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 5. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	73
Tabel 5. 2 Karakteristik Responden.....	74
Tabel 5. 3 Statistik Deskriptir Variabel Audit Internal.....	75
Tabel 5. 4 Statistik Deskriptir Variabel Kompetensi SDM.....	76
Tabel 5. 5 Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi.....	77
Tabel 5. 6 Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	78
Tabel 5. 7 Average Variance Extracted (AVE).....	80
Tabel 5. 8 Cross Loading Factor	81
1	
Tabel 5. 9 Composite Reliability.....	82
Tabel 5. 10 R-Square (R^2).....	83
Tabel 5. 11 Hasil Uji Hipotesis.....	85
Tabel 5. 12 Path Coefficient Tahap I.....	87
Tabel 5. 13 Path Coefficient Tahap II.....	88
Tabel 5. 14 Hasil Total Effects.....	89
Tabel 5. 15 Hasil Specific Indirect Effects.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	49
Gambar 5. 1 Outer Model Graphical Output.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau tersebut kemudian membentuk suatu provinsi. Provinsi merupakan gabungan dari beberapa kabupaten atau kota. Jumlah kabupaten/kota saat ini di Indonesia adalah 514 kabupaten yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Hal ini menjadi potensial untuk kabupaten/kota mengelola sistem pemerintahannya sendiri. Sistem pengelolaan tersebut disebut sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengembangkan daerah serta isi yang ada di dalam daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan suatu daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum yang terbaru untuk pelaksanaan otonomi daerah. Aturan ini juga sudah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yakni dua kali di tahun 2015 dan satu kali di

tahun 2020. Perubahan aturan ini terjadi untuk memaksimalkan penyelenggaraan otonomi daerah guna memajukan potensi daerah tersebut.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan yang baik untuk pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat bebas berkreasi untuk membangun daerahnya dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Salah satu bentuk kegiatan otonomi daerah adalah mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Poin penting dari keuangan daerah adalah adanya hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengelola dengan baik keuangan daerah. (Republik Indonesia : 2014)

Manajemen keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tata usaha daerah merupakan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan. Tata usaha daerah ini terbagi menjadi dua yakni tata usaha umum dan tata

usaha keuangan. Tata usaha keuangan dalam pemerintah daerah lebih dikenal dengan nama akuntansi keuangan daerah. (Akhmad : 2019)

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan berpengaruh pada kemajuan suatu daerah. Hal ini didukung oleh teori *stewardship*. Teori *stewardship* menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen dan kesuksesan perusahaan, jika kesuksesan perusahaan tercapai maka hal itu meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Kesuksesan yang dicapai oleh pemerintah/organisasi juga ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan kepuasan manajemen dengan memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang telah dicapainya. Petumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Mahmudi (2016: 2) menyatakan bahwa salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas pemerintah daerah dapat dilihat pada kinerja keuangan.

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan sangat bermanfaat untuk menilai kinerja di masa lalu yang mana hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan di masa yang akan datang. Namun, kinerja keuangan pemerintah daerah masih dipandang rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya LKPD yang

bermasalah yang ditemukan oleh BPK pada tahun 2022.

Pada Tahun 2018 BPK merilis Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II yang menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan lemahnya sistem pengendalian internal. Terdapat 100 kasus kelemahan sistem pengendalian internal di Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan beberapa masalah antara lain pencatatan belum akurat (46 kasus), Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak lengkap (18 kasus) dan lain-lain kelemahan SPI (36 kasus). Hasil audit yang dilakukan oleh BPK membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.

Lima tahun terakhir ini (2018-2022) hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku Utara menunjukkan kualitas yang kurang baik atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Opini yang diperoleh berada di tingkat WDP dan TMP. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berarti auditor masih merasa keberatan terhadap perkiraan dalam LKPD yang telah diperiksa. Sedangkan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) adalah kondisi dimana auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit sehingga auditor tidak menyimpulkan pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Berikut ringkasan opini hasil audit BPK untuk Kabupaten Pulau Taliabu:

Tabel 1. 1 Hasil Audit BPK untuk Pemerintah Kabupaten

Pulau Taliabu 2018-2022

No	Tahun	Opini
1	2018	WDP
2	2019	TMP
3	2020	TMP
4	2021	WDP
5	2022	WDP

Sumber: <http://bpk.go.id>

Berdasarkan opini BPK yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama lima tahun terakhir, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi unsur akurat, relevan, kredibel sehingga kualitasnya masih rendah. Sementara pemerintah daerah dituntut untuk mendapat opini WTP yang mencerminkan kredibilitas laporan keuangan guna menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Adanya kasus di atas, maka penting menilai kualitas laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas yang dimaksud bukan hanya tentang gambaran cara mendapatkan dan menghabiskan uang publik, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menggunakan uang publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan. Anggaran publik harus digunakan untuk kepentingan publik. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Adanya audit oleh BPK ini menjadi upaya pemerintah untuk mengetahui apakah LKPD yang disajikan telah diungkapkan dengan wajar dan berkualitas. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setelah BPK melakukan pemeriksaan maka BPK akan mengeluarkan opini yang merupakan hasil penilaian atas kualitas LKPD. Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tertinggi yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan berkualitas adalah opini WTP. Opini WTP terhadap laporan keuangan dapat menaikkan tingkat keyakinan yang tinggi untuk mempercayai informasi LKPD.

Sebelum diaudit oleh auditor eksternal (BPK), maka laporan kualitas pemerintah daerah perlu dilakukan audit internal terlebih dahulu. Audit internal akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam suatu organisasi. *The institute of international auditors* (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”. (IIA (the Institute of Internal Audit ,1999).

Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam menentukan apakah pimpinan operasional organisasi telah mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adanya audit internal dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kinerja

perusahaan. Audit internal pun harus bebas dari hambatan dalam menjalankan tugasnya.

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak maupun dalam pelaksanaan audit. Fungsi Audit Internal di Pemerintah Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP. APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. APIP melakukan pengawasan internal yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, khususnya Inspektorat Kab/Kota saat ini adalah Mereviu laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa APIP pada kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati /walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Adanya pengawasan dari Inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Teori *stewardship* menerangkan mengenai kondisi dimana *steward* atau manajer pengelola tidak memiliki keinginan pribadi dan mengutamakan kepentingan pemilik. *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991: 49). Hal ini berarti bahwa pemerintah sebagai pihak manajemen lebih mementingkan hasil pokok mereka untuk kebutuhan organisasi. Pemerintah harus lebih mengutamakan upaya dalam meraih tujuan bersama dan bukan pada tujuan individu. Apabila muncul perbedaan dalam kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat, maka pemerintah (*steward*) akan lebih mementingkan nilai kebersamaan.

Teori ini dapat digunakan dalam organisasi nonprofit serta organisasi sektor publik. Pada organisasi sektor publik pemilik sumber daya atau prinsipal memiliki keterbatasan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan, dengan demikian fungsi tersebut dilimpahkan kepada manajer pemerintah sebagai *steward* yang lebih mampu dan mengerti mengenai masalah tersebut.

Kualitas LKPD juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM) (Amira & Astuti, 2023). Kualitas dari SDM sangat memengaruhi dalam proses pembuatan LKPD. SDM harus memiliki kompetensi dalam penyusunan LKPD. Ada tiga indikator dalam kompetensi sumber daya manusia, pertama adalah pengetahuan, kedua adalah keterampilan, dan ketiga adalah sikap. Sumber daya yang berkompeten

mampu memahami logika akuntansi yang ada, dan bisa lebih efisien, efektif, dan ekonomis dalam menyusun laporan keuangan (Nirwana & Haliah, 2018). SDM yang berkompeten adalah yang memiliki pengalaman dalam bidang keuangan serta sering mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik.

Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau kelembagaan, untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Ihsanti & Emilda (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun telah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini perlu adanya komitmen organisasi guna menunjang penyusunan laporan keuangan yang benar dan baik.

Komitmen organisasi (*organization commitment*) juga menentukan kualitas laporan keuangan (Kaok, 2021). Komitmen organisasi sebagai loyalitas seorang individu pada organisasi dan merupakan salah satu

penentuan hasil dari kualitas laporan keuangan yang akan disusun. Adanya komitmen organisasi dari masing-masing individu pada kompetensi sumber daya manusianya maka akan terwujud dalam hasil LKPD.

Fenomena masih tingginya tingkat temuan oleh BPK sebagai auditor eksternal namun tidak ditemukan oleh APIP sebagai auditor internal menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Banyaknya kasus hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi yang menyeret dan melibatkan pejabat pemerintah daerah yang mengindikasikan masih lemahnya pengawasan APIP, masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP dan pentingnya peran APIP dalam hal ini auditor pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai audit internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Diantaranya yaitu Ariffadia *et al.* (2023) dan Amira & Astuti (2023). Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi atau variabel intervening untuk melihat hubungan audit internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas. Maka, penulis ingin melakukan

penelitian dengan judul **PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LPKD) DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* PADA PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIBU.**

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, mengantarkan peneliti pada beberapa masalah penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Pulau Taliabu?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Pulau Taliabu?
4. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD melalui komitmen organisasi di kabupaten Pulau Taliabu?
5. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD melalui komitmen organisasi di Kabupaten Pulau Taliabu?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Pulau Taliabu.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Pulau Taliabu.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap kualitas LKPD melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Pulau Taliabu.
5. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD melalui komitmen organisasi di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan daerah. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian lainnya yang terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah.

2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari beberapa bagian yakni:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengemukakan studi Pustaka terkait teori-teori yang akan mendukung permasalahan dalam penelitian ini.

3. BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan tentang kerangka konseptual dan penyusunan hipotesis.

4. BAB IV METODE PENELITIAN

Bab keempat terdiri dari rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab kelima yaitu hasil penelitian yang berisikan analisis penelitian dari data yang diolah dan diuji, serta pembahasan atas atas hasil penelitian.

6. BAB VI PENUTUP

Bab keenam merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, dan implikasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*) adalah *Grand theory* yang mendasari penelitian ini. *Stewardship Theory* (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Rini, 2018). Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Memaksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Pada konteks ini, publik sebagai pelaku adalah masyarakat umum yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan prinsip ini, Undang-Undang kemudian mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD sebagai representasi publik. Pola atau model manajemen akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan pola dalam teori keagenan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah agen rakyat melalui perwakilan di DPR atau DPRD.

Pada penelitian ini Inspektorat Kabupaten merupakan *steward* (pengurus) yang dipandang sebagai pihak yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik (masyarakat) terutama *stakeholder*, dengan begitu predikat *good governance* akan mudah tercapai. Teori ini juga mengemukakan bahwa peran auditor internal bukanlah sekedar untuk menilai kesesuaian laporan keuangan melalui bukti pendukung, tetapi juga berperan dalam memberi saran kepada *auditee* (subjek yang diudit) sebagai *shareholder*. Saran tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi/dinas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber daya pada pemerintah daerah tersebut.

2.2. Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Selain menggunakan teori *Stewardship* seperti yang dijelaskan di atas, penelitian ini juga mengacu pada teori kelembagaan. *Institutional theory* (teori kelembagaan) merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk memahami perilaku individu dan organisasi (Joko, 2019: 309). Teori ini menjelaskan kemampuan struktur makna yang dilembagakan memengaruhi proses dalam organisasi.

Pada perkembangannya, *institutional theory* terbagi dalam dua kelompok pandangan yaitu *old-institutional theory* (OIT) dan *new institutional theory* (NIT). OIT berpendapat bahwa *institutionalization* terjadi karena adanya nilai (*values*), norma (*norms*), dan perilaku (*attitudes*) yang bersifat *taken for granted*, sedangkan NIT berpendapat bahwa *institutionalization* terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan *classifications, routines, scripts, dan schema* (Joko, 2019: 309).

Teori kelembagaan didasarkan pada gagasan (DiMaggio dan Powell, 1983) bahwa suatu organisasi (dalam hal ini entitas pemerintahan) dibentuk oleh konteks kelembagaan di sekitarnya (Joko, 2019: 309). Pikiran atau ide yang berpengaruh dilembagakan dan kemudian disahkan secara hukum dan diterima sebagai metode dalam mengoperasikan organisasi. Proses dari legitimasi dilakukan oleh organisasi karena tekanan lingkungan kelembagaan.

(DiMaggio & Powell, 1983) berpendapat bahwa suatu organisasi terbentuk karena adanya kekuatan dari luar organisasi melalui proses

imitasi atau kepatuhan. Organisasi akan berusaha untuk menyesuaikan diri atau disebut isomorfisme (proses menyesuaikan) karena tekanan eksternal. Isomorfisme ini juga dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada tiga proses bagaimana suatu organisasi melakukan isomorfisme menurut (DiMaggio dan Powell,1983) termasuk paksaan, imitasi dan normatif. Variabel penentu kualitas laporan keuangan seperti kepatuhan terhadap keuangan, peraturan manajemen, pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan informasi teknologi adalah bentuk isomorfisme.

2.3. Audit Internal

2.1.1. Pengertian Audit Internal

Audit internal hanya terdapat pada organisasi yang relatif besar. Dalam organisasi ini pimpinan membentuk banyak departemen. Bagian, seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagai wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Definisi mengenai audit internal menurut Hery (2017: 238) sebagai berikut: "Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen (Hery, 2017: 238).

Standard for Professional Practice of Internal Auditing, menyatakan bahwa:

“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization”. (Audit Internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi).

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017: 203) pengertian audit internal sebagai berikut:

“Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Adapun pengertian audit internal menurut Mulyadi (2023: 221) adalah kegiatan penilaian yang independen, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Amin (2012: 136) berpendapat bahwa audit internal adalah, jaminan independen objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, membantu organisasi dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi untuk menilai suatu organisasi serta menjamin pencapaian tujuan dan sasaran-

sasaran kegiatan dalam perusahaan dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak yang bersangkutan.

2.1.2. Fungsi Audit Internal

Pada awalnya, audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan. Sebagai konsekuensi dari fungsinya menyebabkan auditor internal dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki kekuasaan secara langsung terhadap bagian dalam organisasi

Namun sejalan dengan meningkatnya sistem, aktivitas audit internal tidak lagi hanya berputar pada pengawasan pembukuan informasi akuntansi semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol, dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Fungsi audit internal menurut Tunggal (2012: 1) mengemukakan bahwa fungsi audit internal yaitu mencakup Departemen Audit Internal dan setiap departemen yang lain, aktivitas atau *outsorce* jasa yang memenuhi peranan audit internal. Menurut Hery (2017: 245), Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap

kegiatan manajemen.

Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2023: 211) terbagi menjadi dua, yakni:

1. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Fungsi-fungsi audit internal yang dikemukakan oleh beberapa ahli memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa fungsi audit internal yang sangat mendasar adalah sebagai alat manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian internal suatu

perusahaan. Kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi yang akan menjadi nilai tambah bagi manajemen dan dijadikan dasar oleh manajemen untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.

2.1.3. Ruang Lingkup Audit Internal

Setiap auditor internal haruslah mematuhi dan menaati standar serta kode etik profesi audit internal, termasuk di dalamnya adalah mengenai ruang lingkup (*scope*) audit internal dalam suatu perusahaan. Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan internal, terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan serta ditaati oleh auditor internal, salah satunya adalah terkait dengan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan audit internal.

Ruang lingkup audit internal menurut *The Institute Of Internal Auditors* (IIA) adalah sebagai berikut:

“The scope of audit internal should encompass of the adequacy and effectiveness the organizations system of performance in carrying out assigned responsibilities: (1) reliability and integrity of information, (2) compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contracts, (3) safeguarding of asset, (4) economical and efficient use of resources, (5) accomplishment of established objectives and goals for operations programs.”

Definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja berkaitan dengan tanggung jawab anggota organisasi, yang mencakup: a) Keadalan dan keutuhan informasi, b) Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan serta kontrak, c) Perlindungan terhadap harta benda, d) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan e) Pencapaian tujuan perusahaan.

Hery (2017: 270) mengatakan bahwa ruang lingkup audit internal: adalah menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini berarti seorang auditor harus memiliki kemampuan untuk menilai tingkat keefektifan suatu sistem pengendalian dalam suatu organisasi.

Mulyadi (2010: 212) juga berpendapat bahwa ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, maka pemeriksaan internal harus:

1. Mereviu keandalan (reliabilitas dan integritas)

Mereviu keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.

2. Mereviu berbagai sistem yang telah ditetapkan

Mereviu berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. Mereviu berbagai cara yang dipergunakan

Mereviu berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4. Mereviu berbagai operasi atau program

Mereviu berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.4. Tujuan Audit Internal

Standar audit AICPA yang terklarifikasi dalam buku Arens *et al.* (2015: 168) bahwa tujuan audit internal adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor internal ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Sedangkan tujuan audit internal menurut Hery (2018: 39) adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.

Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan (Agoes, 2013: 205). Kaunang (2013: 5) dalam bukunya juga mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) tujuan atau sasaran dilakukannya aktivitas audit internal, yaitu:

1. Penilaian yang independen dan rekomendasi kepada manajemen.

Sasaran atau tujuan secara menyeluruh dari internal audit department (departemen audit internal) adalah memberikan penilaian yang idependen (tidak memihak) atas catatan-catatan akuntansi, keuangan, dan segala aktivitas dalam suatu perusahaan atau grup dari perusahaan dan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan.

2. Melayani kepentingan manajemen.

Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit internal dituntut untuk:

- a. Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada manajemen.
- b. Produktif dalam membuat dan memberikan rekomendasi/laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional dan keuangan.
- c. Menjadi perpanjangan tangan manajemen dalam hal

pengawasan (*control*).

- d. Pimpinan dan dewan pengawasan organisasi harus memahami dengan jelas tentang pelayanan yang diberikan oleh auditor.

2.1.5. Tanggung Jawab Auditor Internal

Tanggung jawab auditor internal dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok permasalahan.

Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan” (Tunggal, 2012:21)²⁵. Pada dasarnya tanggung jawab audit internal adalah membantu anggota perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan peninjauan ulang atas informasi- informasi yang saling berhubungan.

Kewenangan dan tanggung jawab auditor internal harus dinyatakan dengan dokumen tertulis yang formal dalam anggaran dasar organisasi dengan mendapat persetujuan dari manajemen senior. Hery (2017: 239) menyebutkan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit

internal harus dinyatakan secara formal dalam Piagam Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Pernyataan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal.

2.1.6. Audit Internal Pemerintah

Auditor internal dalam suatu instansi berfungsi menilai apakah sistem pengawasan internal yang telah ditetapkan berjalan dengan akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi audit internal di pemerintahan Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya di sebut APIP. APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah, lingkup kegiatan intenal yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan, sebagai berikut:

1. Kegiatan penjamin kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
 - a. Audit;
 - b. Audit Keuangan:
 - 1) Audit keuangan yang diberikan opini.
 - 2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
 - c. Audit Kinerja,

- d. Audit dengan tujuan tertentu,
 - e. Evaluasi,
 - f. Reviu,
 - g. Monitoring.
2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan kualitas, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Standar audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi audit terhadap aspek keuangan tertentu, Audit kinerja, Audit dengan tujuan tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, serta Pemberian jasa konsultan (*consulting activities*).

2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan.

SDM dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nawawi (2017: 44) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM (Wati *et al.*, 2014: 2).

Kompetensi dianggap sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki

jiwa berkompotensi yang sportif. Sumber daya manusia yang professional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusun laporan keuangan yang berkualitas.

Adapun menurut Moeherton (2014:5) mengartikan kompetensi sebagai *“A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related of criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation²⁹.”* Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

SDM merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari

organisasi tersebut. Kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi suatu nilai informasi suatu laporan keuangan pemerintah. Seorang pegawai yang memiliki kapasitas yang baik, integritas dan keandalan dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan *output* yang dapat dipertanggungjawabkan (Shinta & Darti, 2022). Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan SDM dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pada pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki SDM yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Drina *et al.* (2014) mengemukakan standar kompetensi mencakup tiga aspek yang selanjutnya menjadi indikator kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu mengetahui dan memahami pengetahuan dibidangnya masing- masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab, mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur dan teknik.
2. Keterampilan (*skills*), kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan maupun secara lisan.
3. Sikap (*attitude*), memiliki kemampuan dalam berkreaitivitas dalam bekrja, semangat kerja yang tinggi, dan memiliki kemampuan dalam perencanaan³¹.

Kompetensi merupakan *knowledge*, *skill*, dan *attitude* cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah suatu tingkat loyalitas seseorang karyawan dimana karyawan tersebut akan bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi merupakan dorongan dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu. Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang diprioritaskan.

Komitmen organisasi menurut Kaok (2021) dan Tampubolon *et al.* (2019) adalah sebuah sikap mental yang mewakili keinginan, kebutuhan dan kewajiban untuk melanjutkan pekerjaan dalam suatu organisasi. Tiga komponen mengenai komitmen organisasi, yaitu: Komitmen afektif (*affective commitment*), Komitmen kontinu (*continuance commitment*), Komitmen normatif (*normative commitment*).

1. *Affective commitment*, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap

dalam organisasi karena keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini (*want to*).

2. *Continuance commitment*, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan meneta pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (*need to*).
3. *Normative Commitment*, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (*ought to*).

Komitmen terhadap tujuan anggaran dalam organisasi didefinisikan sebagai tekad untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja individu ditentukan oleh komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai. Komitmen organisasi dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain (1) faktor eksternal yang terdiri dari otoritas, faktor teman sebaya, dan penghargaan eksternal, (2) Faktor interaktif yang terdiri dari partisipasi dan persaingan dan (3) faktor internal yang terdiri dari harapan dan penghargaan internal.

2.6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.6.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30- 32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan³⁵.” Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan: “Laporan keuangan

daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2.6.2. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 35 ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

2.6.3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 secara spesifik menguraikan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah tujuan untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mencapai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan
 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan

Upaya- upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit, laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan kas suatu entitas pelaporan. Dengan adanya penjelasan dari PP No 71 tahun 2010 yang menyatakan: "Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui

jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauh mana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut. Kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan pemerintah.

2.6.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Pengertian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Menurut Indra

Bastian (2017: 9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Suatu Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik antara lain relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Ratmono & Sutrisno , 2019). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga dikatakan

berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan pemerintah daerah.

2.6.5. Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan,

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi yang disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan harus lengkap. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan atau kesalahan dapat dicegah sebelumnya.

2. Andal,

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, dan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah

menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.7. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kualitas audit dan variabel lain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ariffadia <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

			menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Dan sistem keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Ini membuktikan bahwa karakteristik dalam sistem akuntansi keuangan belum dilakukan dengan baik, sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Amira & Astuti (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Bengkulu Selatan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara secara uji silmutan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Hidayati <i>et al.</i> (2023)	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal sebagai Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal mampu menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sebesar 58,1% dengan hasil bahwa kedua variable indepeden berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
4	Budiantoro <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Peranan Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.	Peran audit internal (uji-t) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan peran audit internal dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

			Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi derajat sistem pengendalian internal, maka semakin baik dan akurat kualitas laporan keuangan tahunan yang disusun. Dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang berkualitas tinggi memerlukan keahlian auditor.
5	Tandirureng <i>et al.</i> (2022)	<i>Analysis of Factors Influencing the Quality of Local Government Financial Reports.</i>	Komitmen organisasi, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas keuangan laporan.
6	Kaok (2021)	Analisis Komitmen Organisasi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan Kompetensi SDM juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
7	Ngguna <i>et al.</i> (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu.	Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti peningkatan kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh adanya peningkatan maupun

			penurunan pemanfaatan sistem informasi keuangan. Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya peran internal audit pemerintah daerah.
--	--	--	--

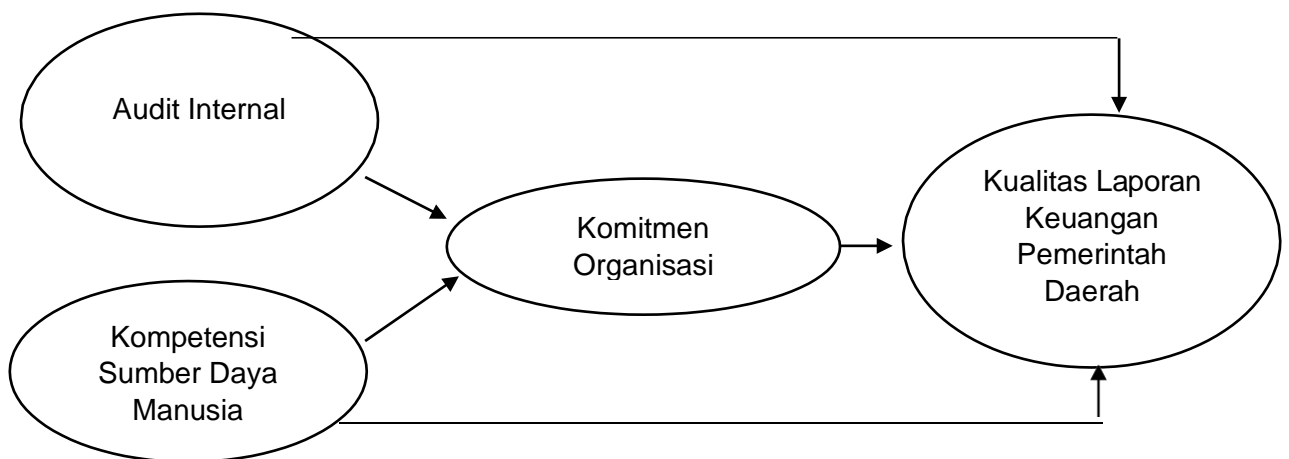
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah uraian atau gambaran yang berkaitan mengenai antar variabel dengan variabel lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Tujuan dari kerangka konsep ini adalah untuk membantu peneliti dalam menghubungkan teori dan hasil temuan. Berdasarkan keterkaitan teori, konsep, dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh audit internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimediasi oleh komitmen organisasi.

Oleh karena itu, untuk membantu memahami penelitian ini, diperlukan adanya kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2. Hipotesis

Berdasarkan pada kajian teoritis dan kerangka pikir maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

3.2.1. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi. Kesalahan penyampaian informasi akan mengakibatkan kerugian bagi pihak internal dan pihak eksternal. Maka peran audit internal dalam pemerintah daerah perlu dilakukan guna mencegah kesalahan dalam laporan keuangan.

Teori *stewardship* merupakan teori yang digunakan dalam organisasi sektor publik karena dalam teori ini lebih mengedepankan tujuan bersama. Teori ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pelayanan yang dapat diberikan salah satunya melalui pengawasan dari audit internal untuk memperhatikan transparansi pengelolaan laporan keuangan dari setiap kegiatan yang melibatkan sumber daya milik prinsipal.

Hidayati (2023:147) dalam penelitiannya membuktikan bahwa peran audit internal memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Kualitas pada laporan keuangan itu sendiri akan mungkin terwujud apabila terdapat peran audit internal di dalamnya. Segala pelaksanaan kegiatan yang

melibatkan anggaran keuangan negara harus dilakukan pengawasan oleh audit internal atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Penelitian Budiantoro *et al.* (2022) juga menemukan hasil yang sama. Peran audit internal pada Bank Syariah Mandiri berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan. Artinya, audit internal diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : Audit Internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Tanpa sumber daya manusia suatu organisasi tidak akan beroperasi. Organisasi/pemerintahan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pemerintahan.

Kompetesi sumber daya manusia (SDM) adalah aspek penting dalam menunjang terciptanya kualitas yang ada pada laporan finansial. Kompetensi yang layak dalam sumber daya manusia melambangkan keahlian yang seharusnya ada pada diri tiap individu baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan yang diperlukan dalam memenuhi kewajibannya.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sangat membutuhkan kompetensi SDM yang sesuai dengan bidang tersebut. Organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan mewujudkan kepentingan bersama. Dalam teori *stewardship*, pemilik sumber daya sebagai prinsipal memberikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai *steward* dalam melaksanakan fungsi pengelolaan. Hal ini berarti, pemerintah harus lebih memperhatikan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola laporan keuangan untuk mewujudkan organisasi yang baik.

Riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ariffadia *et al.* (2023) memberi kesimpulan yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amira (2023) yang juga menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Hidayati (2023), Budiantoro (2022), dan Kaok (2021) juga menunjukkan hasil yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 : Kompetensi Sumber Daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3.2.3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kesuksesan suatu organisasi sangat bergantung kepada komitmen dari para anggotanya. Tingkat partisipasi dari seorang anggota agar bertahan dalam suatu institusi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kelancaran dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Komitmen organisasi dari para anggota akan membawa mereka pada keputusan sejauh mana mereka bekerja untuk tetap atau tidak meninggalkan organisasi tersebut.

Wibowo (2017) menyebutkan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. Komitmen yang semakin tinggi terhadap organisasi akan cenderung lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam organisasi hal tersebut akan mempengaruhi kualitas LKPD. Dengan tidak adanya komitmen organisasi maka akan mengurangi kepedulian SDM untuk melaksanakan tugasnya dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian Tandirerung (2022) membuktikan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menandakan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan berbanding lurus dengan komitmen organisasi⁴⁸. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kaok pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah

sebagai berikut:

H3 : Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.4. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komitmen Organisasi

Audit internal adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan atau jaminan yang independen dan objektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Aktivitas ini akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.

Stewardship theory menggambarkan bahwa pemerintah harus melakukan audit internal sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Audit internal ini dapat terlaksana jika didukung dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk terus melakukan audit internal pada semua laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya komitmen organisasi ini menjadi awal dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintah daerah yang transparan.

Penelitian ini menduga bahwa komitmen organisasi dapat memediasi hubungan antara audit internal terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4 : Audit Internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui komitmen organisasi.

3.2.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komitmen Organisasi

Institutional theory (teori kelembagaan) merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk memahami perilaku individu dan organisasi. Teori ini menjelaskan kemampuan struktur makna yang dilembagakan memengaruhi proses dalam organisasi. Dalam teori ini dikemukakan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki pikiran atau ide yang kemudian dilegalkan untuk menjalankan organisasi. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia dalam organisasi harus mempunyai kompetensi dan komitmen dalam menjalankan organisasi tersebut.

Pada *Stewardship Theory* didasarkan pada *steward* yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada *teori stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self-serving* dan pro- organisasi. Perilaku *steward* tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self-serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama,

steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Penelitian ini menduga bahwa komitmen organisasi dapat memediasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis sementara yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H5 : Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui komitmen organisasi.